

V. PEMBAHASAN

A. Wilayah Pesisir

Pengertian Wilayah Pesisir berdasarkan UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yaitu "Wilayah Pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut; ke arah darat Wilayah Pesisir meliputi baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut mencakup bagian laut yang dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran".

Pemahaman masyarakat mengenai Wilayah Pesisir menjadi salah satu faktor yang menentukan seseorang memilih hidup di Wilayah Pesisir.

Data ini ditemukan dari hasil wawancara dengan informan 1

Wilayah Pesisir merupakan tempat bertemunya wilayah daratan dan laut. Pada jaman dulu Wilayah Pesisir merupakan wilayah strategis transportasi. Sebagian besar warga pesisir merupakan mayoritas warga pendatang yang bekerja di sektor informal dan mereka tinggal di perkampungan informal dari berbagai etnis. Arus kedatangannya beragam, ada yang sudah mulai sejak tahun 1957, 1968 dan ada yang baru datang pada tahun 1988 bahkan tahun-tahun setelah 1990. Masyarakat pesisir Bandar Lampung sebagian besar merupakan masyarakat miskin yang sehari hari bekerja sebagai nelayan, buruh, tukang becak dan pedagang kecil, tukang jamu dan lain-lain.

Menurut Dahuri, et.al., (2004) “Wilayah Pesisir merupakan suatu kesatuan ekologi yang mempertemukan kawasan darat dan laut”. Selain sebagai wilayah strategis bagi kegiatan transportasi antar pulau, Wilayah Pesisir pun mempunyai potensi kekayaan yang besar, dan dapat dengan mudah terkena dampak dari aktivitas manusia. Oleh sebab itu diperlukan adanya pemanfaatan wilayah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

Adapun karakteristik umum dari wilayah laut dan pesisir dapat disampaikan sebagai berikut:

- f. Laut merupakan sumber dari “*common property resources*” (sumber daya milik bersama), sehingga kawasan memiliki fungsi publik/kepentingan umum.
- g. Laut merupakan “*open access regime*”, memungkinkan siapa pun untuk memanfaatkan ruang untuk berbagai kepentingan.
- h. Laut bersifat “*fluida*”, dimana sumber daya (biota laut) dan dinamika *hydro-oceanography* tidak dapat disekat/dikapling.
- i. Pesisir merupakan kawasan yang strategis karena memiliki topografi yang relatif mudah dikembangkan dan memiliki akses yang sangat baik (dengan memanfaatkan laut sebagai “prasarana” pergerakan).
- j. Pesisir merupakan kawasan yang kaya akan sumber daya alam, baik yang terdapat di ruang daratan maupun ruang lautan, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

(Setia Budhy Algamar, 2003)

Menurut Kepres Nomor 32 Tahun 1990 kawasan 100 meter dari pasang tertinggi merupakan sempadan pantai yang perlu dilindungi. Wilayah Pesisir Bandar Lampung memiliki permasalahan yang rumit, mengingat kawasan tersebut lahannya telah menjadi hak milik dan aktifitas kegiatan di sepanjang pantai telah menutupi pantai sebagai ruang publik. Untuk mengembalikan fungsi pantai dengan fungsi lindungnya sebagai sempadan pantai dan ruang publik diperlukan reklamasi pantai yang berwawasan lingkungan.

Berdasarkan rencana pengelolaan lingkungan Kota Bandar Lampung tahun 2005 - 2015 terdapat beberapa hal mendasar yang menjadi pengambilan keputusan untuk dilakukan reklamasi pantai di Kota Bandar Lampung :

1. Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak memiliki lahan yang memadai dapat di gunakan untuk mengenerate pembangunan kota khususnya di Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung;
2. Pada kenyataannya lahan-lahan di sepanjang Wilayah Pesisir sepanjang 16 km adalah hak milik beberapa orang saja, dimana berdasarkan UU Agraria, kepemilikan hak atas tanah bersifat mutlak sehingga sulit bagi pihak pemerintah daerah untuk mengatur dan menata kawasan pantai sesuai dengan rencana yang disusun, terlebih pihak pemerintah daerah tidak memiliki dana untuk dapat membebaskan lahan disepanjang pantai;
3. Wilayah Pesisir merupakan kawasan yang sesungguhnya memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi pengembangan kegiatan khususnya bagi pedagang, jasa, pariwisata maupun permukiman sehingga di perlukan upaya-upaya penataan Wilayah Pesisir guna memanfaatkan potensi yang dimiliki tersebut;

4. Dalam studi sektor perencanaan Kota 1997-1998 disebutkan bahwa peran yang akan dikembangkan bagi Kota Bandar Lampung adalah sebagai pusat penggerak pembangunan regional baik dalam konteks Sumatera Bagian Selatan, Provinsi Lampung maupun Kawasan Aglomerasi Bandar Lampung. Fungsi utama yang dikembangkan adalah sebagai kota perdagangan dan jasa. Sektor yang dikembangkan untuk menunjang fungsi tersebut adalah, transportasi, perdagangan jasa, pariwisata, pendidikan tinggi dan industri manufaktur.

Berbagai pendapat yang mengungkapkan perlunya pemanfaatan potensi kekayaan sumberdaya alam yang terkandung dalam Wilayah Pesisir dapat disimak dalam pernyataan Informan 3 dan informan 5

“Penataan pesisir Kota Bandar Lampung saat ini sudah menjadi hal yang mendesak bagi pembangunan Kota Bandar Lampung. Dengan adanya penataan Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung secara langsung akan berdampak pada perkembangan ekonomi yang akan diikuti dengan meningkatnya pendapatan masyarakat Kota Bandar Lampung secara umum dan masyarakat pesisir secara khusus. Pemerintah harus berani mengambil tindakan tegas apabila ingin memajukan pembangunan ekonomi Kota Bandar Lampung.”

“Penataan pesisir Kota Bandar Lampung dapat meningkatkan pendapatan daerah sebab di Wilayah Pesisir inilah terdapat berjuta kekayaan alam yang belum secara maksimal digunakan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Di Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung terdapat potensi pariwisata, perikanan, perkebunan sumberdaya laut yang masih belum dapat di lakukan oleh masyarakat setempat. Pemerintah seharusnya mencanangkan program pembinaan terhadap masyarakat pesisir dalam hal pengolahan sumber daya yang terkandung di Wilayah Pesisir. Bukan hanya mencanangkan pembangunan saja tetapi masyarakat di arahkan untuk dapat menggali potensi Wilayah Pesisir. Dengan kata lain masyarakat pesisir di arahkan untuk dapat mengolah sumber daya yang ada di Wilayah Pesisir.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan lautan, adalah:

- Adanya perbedaan kepentingan yang cenderung menjurus ke konflik kepentingan antar sektoral dan stakeholder lainnya. Konflik kepentingan ini tidak hanya terjadi antar sektoral dalam pemerintahan tetapi juga dengan masyarakat setempat dan pihak swasta.

Data ini ditemukan dari hasil wawancara dengan informan 4.

Masyarakat pesisir saat ini seakan tersingkirkan akibat adanya perbedaan kepentingan pengelolaan Wilayah Pesisir. Kepentingan para elit atau mereka yang memiliki modal yang besar telah menyebabkan kepentingan masyarakat tersingkirkan. Pembangunan hotel, gudang dan pabrik di Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung menjadikan penataan kawasan tersebut tidak tertata dengan baik. Itulah sebabnya mengapa Wilayah Pesisir menjadi kawasan kumuh. Di sisi lain masyarakat yang tersingkirkan mencari ruang untuk dapat bertahan hidup. Sehingga penataan ruang tidak dapat terkontrol dengan baik.

- Lemahnya kerangka hukum dalam hal pengaturan sumber daya pesisir dan lautan, serta perangkat hukum untuk penegakannya menyebabkan masih banyaknya pemanfaatan sumberdaya ini yang tidak terkendali. Juga tidak adanya kekuatan hukum dan pengakuan terhadap sistem-sistem tradisional serta wilayah ulayat laut dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan.

Data ini ditemukan dari hasil wawancara dengan informan 1.

Apabila ada anggota masyarakat yang ingin mendirikan tempat tinggal di bibir pantai bahkan di atas laut sekalipun, cukup meminta izin kepada ketua lingkungan dan ketua RT setempat, karena tidak ada hak bagi ketua lingkungan dan ketua RT untuk melarang warga yang ingin mendirikan bangunan di bibir pantai.

- Masih minimnya keikutsertaan masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan. Tidak mengherankan apabila masyarakat tidak mempunyai rasa memiliki terhadap pesisir dan lautan yang lestari serta

pemahaman tentang pentingnya nilai ekonomis dan non-ekonomis dari keberadaan pesisir dan lautan yang perlu dijaga.

Data ini ditemukan dari hasil wawancara dengan informan 6.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeliharaan lingkungan membuat Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung menjadi kawasan kumuh. Masyarakat seakan tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya, padahal mereka dapat menggali potensi kekayaan yang terkandung di Wilayah Pesisir. Hal ini dapat di pelajari melalui pelatihan-pelatihan yang di adakan pemerintah baik tingkat Pemerintah Provinsi Lampung maupun Pemerintah Kota Bandar Lampung. Banyak warga masyarakat yang enggan mengikuti pelatihan-pelatihan, alasan mereka tidak adanya waktu untuk mengikuti kegiatan tersebut sebab mereka harus mencari nafkah.

Adanya perbedaan kepentingan, lemahnya kerangka hukum dalam pengelolaan Wilayah Pesisir serta minimnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan telah menimbulkan permasalahan baru di Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung. Permasalahan yang cukup kompleks inilah yang menjadi dasar adanya penataan ruang wilayah Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung. Hal tersebut dapat di lakukan apabila penataan Wilayah Pesisir dilakukan atas dasar pengelompokan potensi Wilayah Pesisir sehingga potensi yang ada dapat termanfaatkan dengan baik tanpa adanya perbedaan kepentingan.

Permasalahan timbul akibat adanya perbedaan kepentingan dalam pengelolaan Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung secara langsung berdampak pada tata ruang Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung sehingga pemanfaatan potensi tidak dapat dikelola dengan baik. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang mengontrol dan mempengaruhi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pengelolaan Wilayah Pesisir guna terwujudnya penataan ruang wilayah Wilayah

Pesisir Kota Bandar Lampung yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga pengelolaan Wilayah Pesisir dapat tertata dengan baik sesuai dengan tujuan

B. Permasalahan Wilayah Pesisir

Pratikto (2005) mengemukakan fenomena yang terjadi pada masyarakat pesisir disebabkan oleh tiga hal yaitu;

- a) Kemiskinan struktural, berkaitan dengan pengaruh faktor-faktor luar (eksternal) seperti sosial ekonomi masyarakat dan ketersediaan insentif, fasilitas pembangunan dan teknologi;

Sebagaimana yang disampaikan oleh informan 4

Secara umum permasalahan yang ada pada masyarakat pesisir ialah masalah ekonomi. Banyak masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap. Apalagi pada musim pancaroba seperti saat ini angin laut sangat berbahaya apabila sedang berlayar mencari ikan.

- b) Kemiskinan super-struktural, adalah kemiskinan yang disebabkan oleh kebijakan makro yang tidak pro pembangunan masyarakat pesisir seperti kebijakan pemerintahan yang berupa proyek dan program pembangunan;

Sebagaimana yang disampaikan oleh informan 2

Potensi kekayaan pesisir saat ini kurang dapat dipergunakan secara maksimal padahal potensi yang terkandung dalam kawasan pesisir sangat luar biasa. Permasalahan pokok yang ada pada masyarakat pesisir merupakan permasalahan ekonomi. Sebagian besar masyarakat pesisir merupakan masyarakat miskin dengan tingkat pendapatan kurang dari Rp. 700.000,- per bulan yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan, sehingga tarap hidup masyarakat dapat dikatakan jauh dari kata sejahtera.

- c) Kemiskinan kultural, merupakan kemiskinan yang berkaitan dengan keadaan yang melekat pada masyarakat pesisir seperti gaya hidup, tingkat pendidikan, budaya, adat, serta kepercayaan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh informan 6

Banyak dari masyarakat tidak memahami permasalahan yang mereka hadapi, yang masyarakat tahu hanya bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sebagian besar dari masyarakat pesisir berkerja sebagai buruh, nelayan dan dagang, rata-rata pendidikan mereka hanya tamatan SLTP. Hal tersebut telah menjadi kendala bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan.

Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung merupakan wilayah padat penduduk dengan berbagai permasalahan yang kompleks. Permasalahan ekonomi, serifikasi tanah, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Menjadi faktor penyebab mengapa masyarakat pesisir berada pada tingkat kemiskinan. Seperti yang dijabarkan dalam table 4.

Tabel 4 Permasalahan Masyarakat Pesisir Kota Bandar Lampung

No.	Permasalahan	Persentase (%)
1.	Ekonomi	35
2.	Sertifikasi Tanah	30
3.	Pendidikan	15
4.	Kesehatan	11
5.	Lain-lain (Fasilitas pembangunan)	9

Sumber : *Survey Jaringan Perempuan Pesisir (JPrP) Kota Bandar Lampung, Tahun 2008*

C. Tata Ruang

Tata ruang menurut Erna Witoelar (2007) adalah kegiatan penataan ruang pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjamin lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan memperhatikan keunggulan komparatif di suatu wilayah, dan mengurangi kesenjangan pembangunan dengan mengurangi kawasan-kawasan yang miskin, kumuh dan tertinggal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007, Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

Struktur ruang pada hakikatnya merupakan hasil dari suatu proses yang mengalokasikan objek-objek fisik dan aktifitas kesatuan kawasan disuatu wilayah. Pemanfaatan ruang yang timbul akibat adanya aktifitas yang tidak terorganisir telah mengakibatkan penataan ruang yang tidak baik sehingga menimbulkan pemukiman kumuh di Wilayah Pesisir. Pengelolaan Wilayah Pesisir yang tidak

baik telah menyebabkan adanya aktivitas yang tidak terkontrol dan tidak sesuai dengan pemanfaatan potensi Wilayah Pesisir.

Di lapangan penataan ruang Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung yang semestinya dapat mengoptimalkan potensi kekayaan alam yang terkandung dalam Wilayah Pesisir justru saat ini mengancam keberadaan ekosistem dan kelestarian alam. Semestinya seluruh unsur baik itu pemerintah, swasta maupun masyarakat yang memiliki kepentingan dapat menjaga kelestarian lingkungan guna pemanfaatan potensi pesisir.

Pemanfaatan Wilayah Pesisir dapat dibagi menjadi dua tipe pengelolaan Wilayah Pesisir guna terwujudnya penataan Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung yang berorientasi pada pemanfaatan potensi Wilayah Pesisir sehingga dapat menyalurkan seluruh kepentingan dalam pengelolaan Wilayah Pesisir. (1) proses yang mengalokasikan aktivitas pada suatu kawasan sesuai dengan hubungan fungsional tertentu. Kedua, proses pengadaan atau ketersediaan fisik yang menjawab kebutuhan akan ruang bagi aktivitas seperti tempat bekerja, tempat tinggal, transportasi dan komunikasi. (Rencana Tata Ruang Wilayah Bandar Lampung, 2003)

Namun data yang ditemukan dari hasil wawancara dengan informan 2

“Pesisir Kota Bandar Lampung merupakan wilayah yang selama ini mendapat perhatian yang kurang dari Pemerintah Kota Bandar Lampung, orientasi pembangunan yang ada pada saat ini lebih cenderung ke kawasan darat sehingga pembangunan di Wilayah Pesisir kurang terkontrol dan cenderung tidak teratur sehingga terkesan seperti kolam sampah raksasa. Potensi kekayaan pesisir saat ini kurang dapat di

pergunakan secara maksimal padahal potensi yang terkandung dalam kawasan pesisir sangat luar biasa”.

Penataan Wilayah Pesisir seharusnya dapat memaksimalkan potensi Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung sehingga pemanfaatan sumber daya yang terkandung dalam Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung dapat dimanfaatkan secara optimal. Tata ruang yang ideal bertujuan memanfaatkan potensi pesisir guna kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, peranan tata ruang pada hakekatnya dimaksudkan untuk mencapai pemanfaatan sumberdaya optimal dengan sedapat mungkin menghindari konflik pemanfaatan sumberdaya, serta dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup serta meningkatkan keselarasan perkembangan antara kawasan di dalam Wilayah Pesisir dan kawasan lain yang terkait di sekitarnya.

Pendekatan penataan ruang ini merupakan pendekatan pengelolaan ruang yang harus menjamin adanya kepentingan sektoral yang terakomodir dan terintegrasi dan dalam prosesnya (perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan) didukung oleh keterlibatan masyarakat serta didukung oleh sistem kelembagaan yang mengarah pada adanya forum komunikasi yang kuat antar stakeholder. Hal tersebut dapat disimak sebagai perbandingan apa yang dikemukakan oleh informan 4

“Penataan ruang yang ideal menurutnya harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat setempat tidak dipinggirkan akibat kepentingan-kepentingan bisnis para elit. Keberadaan masyarakat selama puluhan tahun bukan tidak memberikan kontribusi kepada daerah”.

Tabel 5 Fungsi Tiap Bagian Wilayah Kota (BWK) Kota Bandar Lampung

BWK	Fungsi Kota	Peranan Kota
BWK H	Fungsi Utama : 5. Pusat Pemerintahan 6. Perdagangan Grosir 7. Pariwisata Pantai	1. Menyediakan sarana Perkantoran Pemerintah 2. Menyediakan Pusat Perdagangan dengan skala pelayanan Regional 3. Penataan Kawasan Reklamasi Pantai 4. Merangsang perkembangan sector yang menunjang pariwisata.
	Fungsi Pendukung : 1. Jasa Umum 2. Industri Kecil 3. Konservasi	1. Menciptakan sarana pelayanan umum 2. Penataan perumahan pinggir sungai 3. Pengamanan Kawasan Lindung

Sumber : Evaluasi dan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2003.

Pada dasarnya masyarakat menuntut transparansi pembangunan dan melibatkan masyarakat dalam pembangunan. Sehingga masyarakat merasa dilibatkan secara aktif dalam penataan Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung. Saat ini masyarakat pesisir merasa tersingkirkan akibat adanya rencana penataan ruang Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung. Kekhawatiran mereka akan adanya relokasi/pengusuran dan keterbatasan berlayar nelayan untuk menangkap ikan akan berakibat pada hilangnya mata pencaharian masyarakat pesisir yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan. Kepentingan para elit yang memiliki modal besar menyebabkan mereka semakin tersingkirkan. Masyarakat pesisir

menganggap mereka berhak dilibatkan dalam penataan Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung sehingga kepentingan mereka tidak lagi dipinggirkan.

D. Pro dan Kontra masyarakat Terhadap Penataan Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (1954), pro diartikan sebagai pernyataan setuju. Sedangkan kontra diartikan menentang atau tidak menyetujui.

Pro Kontra terjadi akibat adanya perbedaan persepsi mengenai konsep Penataan Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung. Perbedaan persepsi di sebabkan oleh beberapa hal, seperti; permasalahan ekonomi, serifikasi tanah, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.

1. Masyarakat yang pro Terhadap Penataan Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung

Wilayah Pesisir memiliki potensi kekayaan yang besar seperti, potensi perikanan, pariwisata, pertanian, perkebunan, pertambangan, transportasi dan lain sebagainya. Namun pemanfaatan potensi tersebut saat ini belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Penataan Wilayah Pesisir pada umumnya bertujuan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat pesisir memandang perlu adanya penataan Wilayah Pesisir guna memaksimalkan pemanfaatan potensi kekayaan alam yang tersedia di Wilayah Pesisir Kota Bandar

Lampung. Hal ini dapat di simak pada data wawancara dengan informan 3 dan informan 5

“Dengan adanya penataan Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung secara langsung akan berdampak pada perkembangan ekonomi. Setiap pembangunan pasti akan menyebabkan relokasi, itu merupakan konsekuensi dari pembangunan. Mau tidak mau, suka tidak suka sebagai warga masyarakat kita harus bersedia apabila harus direlokasi karena Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menyediakan RUSUNAWA yang diperuntukan bagi masyarakat pesisir oleh sebab itu saya sebagai warga yang tinggal di Wilayah Pesisir harus bersedia apabila ada relokasi.

“Penataan pesisir Kota Bandar Lampung dapat meningkatkan pendapatan daerah sebab di Wilayah Pesisir inilah terdapat berjuta kekayaan alam yang belum secara maksimal digunakan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Di Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung terdapat potensi pariwisata, perikanan, perkebunan sumberdaya laut yang masih belum dapat di lakukan oleh masyarakat setempat. Apabila penataan Wilayah Pesisir diikuti dengan rencana relokasi maka saya sebagai masyarakat pesisir yang memiliki hak kepemilikan tanah dan bangunan yang sah di keluarkan oleh BPN Kota Bandar Lampung maka saya berhak menuntut ganti rugi dan pemerintah tidak dapat sertamerta merelokasi masyarakat yang memiliki sertifikat tanah tanpa adanya keputusan ganti rugi yang sesuai dengan nilai jual tanah dan bangunan yang berlaku.”

Dengan adanya penataan Wilayah Pesisir pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dapat lebih terarah dengan tetap menjaga fungsi dari Wilayah Pesisir, sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya yang terkandung di Wilayah Pesisir. Pemanfaatan Wilayah Pesisir yang terarah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya pemahaman masyarakat mengenai konsep penataan Wilayah Pesisir yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kerusakan lingkungan serta konflik kepentingan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pesisir telah menimbulkan permasalahan baru. Sehingga

diperlukan adanya suatu tindakan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pesisir. Mengingat potensi sumberdaya yang terkandung dalam Wilayah Pesisir ialah sumberdaya yang dapat di perbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Maka dari itu diperlukan adanya penataan Wilayah Pesisir yang berwawasan lingkungan guna mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya Wilayah Pesisir.

2. Masyarakat yang kontra Terhadap Penataan Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung

Pada dasarnya masyarakat memahami tujuan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menata kawasan pesisir. Penataan Wilayah Pesisir bertujuan memaksimalkan pemanfaatan potensi Wilayah Pesisir sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun dukungan masyarakat dalam pembangunan dibayangi kekhawatiran akan adanya relokasi/penggusuran. Seperti yang dikemukakan oleh informan 1, informan 2, informan 4 dan informan 6

Informan 1

“Saya mendukung program tersebut asalkan saya tidak di pindahkan dari tempat tinggal saya. Apabila pemerintah merelokasi tempat tinggal kami maka ribuan masyarakat terancam kehilangan tempat tinggal dan kehilangan mata pencaharian”

Informan 2

“Pada dasarnya masyarakat pesisir mendukung program tersebut namun yang dikhawatirkan oleh masyarakat pesisir ialah relokasi atau penggusuran, ada ketakutan dari mereka apabila terjadi penggusuran mereka akan kehilangan hak ganti rugi tanah dan bangunan karena keberadaan mereka saat ini dapat di katakan ilegal sebab tidak memiliki sertifikat tanah tambah lagi sebagian besar mata pencharaian masyarakat

peisir merupakan sebagi nelayan sehingga banyak dari mereka terancam kehilangan mata pencaharian.”

Informan 4

“Masyarakat pesisir pada umumnya mendukung program tersebut namun masyarakat menolak apabila ada rencana relokasi. Penataan ruang yang ideal menurutnya harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat setempat tidak dipinggirkan akibat kepentingan-kepentingan bisnis para elit.”

Informan 6

“Kami mendukung sepenuhnya program pemerintah namun kami menolak apabila kami harus direlokasi sebab kehidupan kami sangat tergantung pada Wilayah Pesisir, di sinilah kami hidup dan disinilah kami mati. Apa tidak ada alternatif masyarakat dilibatkan?”

Kekhawatiran masyarakat akan adanya relokasi/penggusuran sangat beralasan sebab apabila terjadi penggusuran masyarakat terancam kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan. Karena banyak masyarakat pesisir yang kehidupannya sangat bergantung pada Wilayah Pesisir. Banyak dari masyarakat pesisir bekerja sebagai nelayan. Belum lagi munculnya konflik sosial seperti konflik tanah yang mana banyak masyarakat pesisir tidak memiliki sertifikat tanah yang sah sebab tanah tempat tinggal mereka sesungguhnya masuk pada area sepadan pantai yang harus dilindungi. Hal tersebut telah menimbulkan adanya penolakan dari masyarakat terhadap penataan Wilayah Pesisir.

Masyarakat yang menolak penataan Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung menghendaki adanya penataan yang melibatkan masyarakat Wilayah Pesisir. Masyarakat menganggap pembangunan yang adil merupakan pembangunan yang secara langsung melibatkan masyarakat setempat dengan tujuan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat setempat. Penataan yang di kehendaki masyarakat pesisir merupakan penataan yang tidak diikuti oleh adanya rencana relokasi/penggusuran lahan tempat tinggal masyarakat. Sehingga penataan yang ada tidak mengorbankan masyarakat pesisir akibat adanya kepentingan para elit yang memiliki modal besar untuk mengelola Wilayah Pesisir.

Pro dan Kontra yang terjadi pada masyarakat pesisir disebabkan oleh perbedaan pemahaman terhadap konsep penataan Wilayah Pesisir. Oleh sebab itu diperlukan adanya pemahaman masyarakat yang lebih baik terhadap konsep penataan Wilayah Pesisir sehingga perbedaan yang menyebabkan Pro dan Kontra penataan Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung dapat ditemukan jalan tengah yang tidak merugikan kedua belah pihak. Dari pemaparan di atas dapat diambil beberapa deskripsi hasil penelitian sebagai berikut :